

DPRD Kabupaten Demak Tetapkan AKD 2024-2029



VARIA LEGISLATIF

DEMAK (KR) - DPRD Kabupaten Demak telah menyelesaikan penyusunan sekaligus penetapan keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) masa keanggotaan 2024-2029, Kamis (10/10/2024). AKD yang dimaksud meliputi Komisi, Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Bamus), Badan Kehormatan (BK), dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Ketua DPRD Kabupaten Demak H Zayinul Fata SE menuturkan, sesuai PP Nomor 12 tahun 2018 pasal 31 ayat 6 tentang pedoman penyusunan tata tertib

DPRD, pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD. Penetapan dilakukan dalam rapat paripurna DPRD.

"Alhamdulillah setelah penetapan pimpinan definitif DPRD Kabupaten Demak kemarin, kami langsung kerja maraton. Mengolah nama-nama usulan enam fraksi DPRD Kabupaten Demak untuk ditempatkan dan ditetapkan dalam keanggotaan AKD masa keanggotaan 2024-2029," tuturnya.

Seperti dibacakan staf Sekretariat DPRD Kabupaten Demak Evy Ulya Yulaicha SPSi, ada lima keputusan DPRD yang mendasari penetapan AKD. Yakni Kep DPRD Kabupaten Demak nomor 23 tahun 2024 tentang penetapan keanggotaan Komisi A, B, C, D. Selain itu Kep DPRD Kabupaten Demak nomor 24 tahun 2024 tentang penetapan Badan Anggaran (Banggar). Serta Kepala DPRD Kabupaten Demak nomor 25, 26, dan 27 yang masing-masing menetapkan AKB Bamus, Bapemperda dan BK.

Sesuai Keputusan DPRD Kabupaten Demak nomor 23 tahun 2024, ditetapkan sebagai Ketua Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan Muadhom SPdI, Wakil Ketua H Sudarno SSoS, dan Sekretaris Fatkhan SH. Anggota Nur Susatyo, Sasriah, Krisna Bayu Ilham Sumarno SH,



Ketua DPRD Kabupaten Demak H Zayinul Fata didampingi Wakil Ketua I, II dan III yakni HS Fahrudin Bisri Slamet, Hj Ike Chandra Agustina dan H Maskuri saat menandatangani keputusan DPRD tentang AKD. Turut menyaksikan Plt Bupati Demak KH Ali Makhsum.

Nuryono Prasetyo SE, Muhammad Ali Muhamad, Gunawan, dan Bambang Setyo Utomo MH.

Komisi B bidang Ekonomi ditetapkan sebagai Ketua Tatiek Sulistajani SH, Wakil Ketua H Marwan, Sekretaris Moh Sofii

SPdI. Anggota Heny Setyowati SE, Ario Arzaq Akbar SM, Suhartono ST dan Ahmad Riyanto ST, Rizky Erfandy Kurniawan SE MM, Eko Setyo Budi Utomo dan Ristiko Ardan Nari.

Komisi C bidang Pembangunan,

ditetapkan sebagai Ketua Ulin Nuha SPdI, Wakil Ketua H Sonhaji SH, dan Sekretaris H Muntohar SH. Anggota Drs H Syafii Afandi SPdI, Isa Ansori ST, H Busro SPd, Muhammad M Rafii, Robot Frendy Kurniawan, Adi Miskul Firdaus, Ahmad Mansur SE, Sulkan, Suhartono.

Komisi D bidang kesejahteraan rakyat ditetapkan sebagai Ketua H Mu'thi Kholil SH, Wakil Ketua Muhammad Asyhad SHum, dan Sekretaris H Faozan SH. Anggota Sukarmin, Sukono, H Sudarno, M Syafii SH, Hermin Widaywati SPd, Dian Eko Kristiyanto SH, H Danang Saputro SH, Subari, dan Ibrahim Suyuti SH.

Sehubungan itu, Plt Bupati Demak KH Ali Makhsum MSI menyampaikan, AKD adalah bagian penting lembaga legislatif dalam menjalankan tugas pemerintahan, penganggaran dan pengawasan. Adanya AKD juga mendukung akselerasi pembangunan.

"Maka itu kami sambut baik dan apresiasi kerja cepat DPRD, dan berharap koordinasi dan sinergitas yang sudah terjalin bisa semakin harmonis efektif dan produktif. Selamat bekerja. Semoga membawa kebaikan dan kemajuan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Demak," tandas Ali Makhsum. ssj



Ketua DPRD Kota Magelang menerima petikan SK yang diserahkan Ketua PN Kota Magelang.

Terpilih, Tiga Pimpinan DPRD Kota Magelang

MAGELANG (KR) - Evin Septa Haryanto Kamil, Imam Indra S SE MM dan Bustanil Arifin ST bersama-sama mengucapkan sumpah sebagai Pimpinan DPRD Kota Magelang masa jabatan 2024-2029, Rabu (9/10). Evin Septa Haryanto Kamil dari PDI Perjuangan sebagai Ketua DPRD Kota Magelang 2024-2029, Imam Indra S SE MM dari PKB sebagai Wakil Ketua I DPRD Kota Magelang 2024-2029 dan Bustanil Arifin ST dari PKS sebagai Wakil II Ketua DPRD Kota Magelang 2024-2029.

Kegiatan dilaksanakan di forum Rapat Paripurna DPRD Kota Magelang, yang dihadiri anggota DPRD Kota Magelang, Forkopimda Kota Magelang maupun lainnya. Penguapan sumpah Pimpinan DPRD Kota Magelang dipimpin Ketua PN Kota Magelang AA Oka Parama Budita Gocara SH MH. Evin mengatakan kedudukan dan fungsi DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, yang memiliki fungsi untuk menyusun dan membentuk perda, melaksanakan pembahasan dan penyusunan anggaran serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. "Maka untuk mencapai hasil yang maksimal dan fungsi tersebut, kinerja DPRD perlu diperkuat," katanya.

Sudah barang tentu dengan berkomitmen untuk menjaga independensi lembaga ini, memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan, berpihak pada kepentingan bersama. Tentunya dengan kerja sama dan dukungan dari seluruh stakeholder dan pemangku kebijakan, Evin yakin semua mampu menghadapi berbagai tantangan tersebut demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kota Magelang.

Evin juga mengajak seluruh anggota DPRD Kota Magelang untuk menunjukkan kinerja maksimal dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai anggota DPRD, karena dalam waktu yang tersisa sebelum Tahun Anggaran 2024 berakhir, banyak agenda yang telah menunggu untuk diselesaikan. (Tha)-f

KEMAJUAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI

Jadi Tantangan dan Peluang Pelaku Usaha

MAGELANG (KR) - Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi dan informasi saat ini menjadi tantangan sekaligus peluang yang dihadapi pelaku usaha, terutama pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang hendaknya disikapi secara positif dan bijaksana.

Demikian dikemukakan Kepala Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Magelang Mulyanto SH MM saat membuka pelatihan pemasaran digital yang dilaksanakan di Kasuari Exotic Resort Bandongan Magelang, Selasa (8/10). Lebih lanjut dikatakan,

hadirnya era digital hendaknya mampu memacu kita semua sebagai pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk berlomba lomba menciptakan inovasi, guna menguatkan basis bisnis dan memperluas jangkauan pemasaran. Penguatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas akan lebih baik jika dapat

didukung dengan keterampilan, strategi, dan kemampuan teknis publikasi secara digital atau online, untuk dapat menghasilkan keluaran yang optimal. Artinya selain meningkatkan daya saing produk, para pelaku usaha harus mau untuk mulai mengembangkan kapasitas diri, guna men-

jangkau pasar yang lebih luas melalui E-Market yang saat ini lebih diminati karena dinilai lebih mudah diakses.

Dalam kesempatan ini Mulyanto juga menyampaikan beberapa pesannya, diantaranya pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif diharapkan mampu memahami lebih dalam terkait pentingnya digital marketing, sebagai ranah yang harus dijajah untuk memperluas pasar, serta membangkitkan kembali semangat pelaku usaha dalam me-

ngembangkan usaha daya tarik wisata, desa wisata, hingga usaha ekonomi kreatif.

Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Arif Rahman Hakim SKom dalam laporannya mengatakan kegiatan ini untuk memberikan pelatihan kepada pelaku wisata antara lain Pengelola Daya Tarik Wisata, Pengelola Desa Wisata, serta Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif di Kabupaten Magelang. Peserta pelatihan sebanyak 40 orang. (Tha)-f

KBMKB ke-XXV Bangun Talud dan Betonisasi Jalan



Penutupan Program Karya Bhakti Mandiri Klaten Bersinar ke-XXV di Desa Pundungsari, Trucuk.

0723/Klaten Letkol Czi Bambang Setyo Triwibowo SE MHan saat dikonfirmasi

masi terpisah mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh ma-

sarakat Desa Pundungsari dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Karya Bhakti Mandiri Klaten Bersinar (KBMKB) ke-XXV.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Pundungsari yang telah berpartisipasi aktif dalam program KBMKB. Sinergi ini menunjukkan bahwa gotong royong adalah kunci keberhasilan. Semoga kerja sama ini dapat terus berjalan demi kemajuan daerah kita," ujar Letkol Czi Bambang Setyo Triwibowo SE MHan. (Sit)-f

Kanwil Bea Cukai Jateng-DIY Sita 87,60 Juta Rokok Ilegal

SEMARANG (KR) - Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Jateng-DI Yogyakarta selama tahun 2024 hingga September dalam penindakan telah mengamankan 87,60 juta batang rokok ilegal. Hal itu diungkapkan Ka Kanwil DJBC Jateng-DIY Ahmad Rofiq pada acara media gathering, Rabu (8/10) di Kantor Kanwil DJBC Jateng-DIY, Jalan A Yani Semarang. Dari hasil penindakan peredaran rokok tanpa cukai mencapai puluhan juta batang rokok itu potensi kerugian negara sebesar Rp 83,62 miliar.

Peredaran rokok ilegal lebih banyak diproduksi di Jatim dan Jateng, pemasarannya di berbagai daerah sampai di Luar Jawa. Sementara kasus terakhir yang berhasil diungkap pengiriman puluhan ribu batang rokok ilegal dari berbagai merek dari Jatim tertangkap di daerah setelah terlibat kejar kejaran dengan

mobil petugas Bea Cukai. Menurut Ahmad Rofiq untuk mencegah upaya tidak terjadi rokok ilegal yang berkelanjutan dilakukan kerja sama dengan aparat hukum TNI/Polri. Selain itu serempak dengan pihak pemerintah daerah dengan menggunakan dana bagi hasil.

Ka Kanwil menyadari dalam upaya menekan beredarnya rokok ilegal

yang merugikan perusahaan rokok legal juga perlu dukungan informasi dari masyarakat.

"Jadi informasi dari masyarakat terkait peredaran rokok ilegal itu sangat-sangat kita apresiasi karena kita nggak mungkin mengetahui seluruhnya," tuturnya. Dari informasi masukan dari masyarakat dianalisis intelijen, aparat hukum dan pemerintah

daerah.

Sementara kegiatan media gathering diisi dengan acara kunjungan ke pabrik rokok tertua di Semarang. Yakni, pabrik rokok Praoe Layar, di kawasan kota lama jalan Merak 15 Semarang. Kedatangan wartawan disambut Manager Operasional PT Rokok Praoe Layar Aditya Wibowo Setyabudi (24). Aditya yang merupakan generasi keempat pendiri pabrik rokok Praoe Layar kepada wartawan mengatakan pihaknya dalam memproduksi rokok lintingan sejak berdiri tahun 1945 dilakukan masih tradisional menggunakan tenaga manusia bukan mesin. Jumlah karyawan, sebagian besar wanita mencapai 350 orang. Ia menyebutkan daerah pemasaran rokok Praoe Layar per bungkus isi 10 batang harga dibandrol sekitar Rp 7 ribu di daerah pantura Batang, Pekalongan sampai Cirebon. (Cry)-f



Kakanwil Dirjend Bea Cukai Jateng-DIY Ahmad Rofiq (tengah) memberikan sambutan.

Mimbar Legislatif

Pentingnya Upaya Penguatan Karakter Anak Bangsa

ANGGOTA DPRD Jateng Ida Nurul Farida mengatakan, persoalan karakter bangsa saat ini harus ditingkatkan. Pemerintah dengan dukungan masyarakat harus melakukan hal itu mengingat banyaknya kasus kekerasan yang melibatkan anak usia sekolah.

Ida Nurul Farida mengatakan hal ini dalam dialog 'Prime Topic' dengan tema 'Penguatan Karakter Anak Bangsa' di Kabupaten Semarang, Selasa (8/10). Dalam dialog tersebut Ida Nurul Farida sebagai narasumber utama. Dialog juga menampilkan narasumber lain seperti Sunarto selaku Kabid Pembinaan Dikdis Disdikbud Jateng dan Lilik Sriyanti Dosen UIN Salatiga. Menurut Ida, peningkatan pendidikan karakter untuk anak harus dilakukan, dan bisa dimulai dari lingkup keluarga. Munculnya banyak tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak usia sekolah karena lemahnya pendidikan di tingkat keluarga. Jika pendidikan dalam keluarga diperkuat, maka kasus-kasus yang terjadi di luar dapat ditekan.

Sunarto mengatakan, beberapa kasus kekerasan yang melibatkan anak usia sekolah terjadi akibat lingkungan sekitar, salah satunya media digital (Medsos). Hal itu sangat dimungkinkan karena era digital



Ida Nurul Farida

begitu melekat di masyarakat, sehingga mampu mempengaruhi semua elemen, termasuk anak-anak. Untuk menekan efek negatif diperlukan pendidikan karakter. Hal itu sebenarnya juga sudah diatur dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di satuan pendidikan formal.

Dalam Kurikulum Merdeka, anak-anak dituntut untuk mengembangkan pemikiran kreatifnya. Dengan begitu, anak-anak lebih fokus dalam pembelajaran pengembangan pemikiran kreatif dan inovatif sekaligus menerapkan prinsip Pancasila di tengah masyarakat. Lilik Sriyanti mengatakan, pengembangan kegiatan aktual bagi siswa perlu pendampingan khusus, sehingga implementasi pendidikan karakter dalam Kurikulum Merdeka dapat lebih nyata di masyarakat. Diakui Kurikulum Merdeka tidak bisa langsung menghentikan semua kekerasan yang melibatkan anak-anak. Dibutuhkan proses, waktu, dan kerjasama dengan semua pihak untuk mengatasi persoalan tersebut. □-f

(Disampaikan oleh Anggota DPRD Jateng Ida Nurul Farida kepada wartawan KR Biro Semarang, Budiono Isman-Anf)